

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. KEDUDUKAN	2
B. DASAR HUKUM	2
C. ASPEK STRATEGI YANG BERPENGARUH	2
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	6
E. KEADAAN PEGAWAI	28
F. ASPEK STRATEGI YANG BERPENGARUH	28
B A B II	30
A. VISI DAN MISI	31
1.. Visi	31
2.. Misi	31
B. TUJUAN DAN SASARAN.....	32
1. Tuju a n.....	32
Tabel 2.1.....	33
2. Sasaran	34
Tabel 2.2.....	34
Tabel 2.3.....	35
Tabel 2.4.....	35
Tabel 2.5.....	36
Tabel 2.6.....	36
Tabel 2.7.....	37

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	37
D. PROGRAM	38
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.....	38
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.....	39
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.....	39
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.....	39
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.....	39
6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.....	40
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.....	42
 B A B III	 43
AKUNTABILITAS KINERJA.	43
A. PENGUKURAN KINERJA	43
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	44
1. Capaian Kinerja.	45
2. Aspek Keuangan	68
 B A B IV	 73
P E N U T U P	73
A. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA.....	73
B. LANGKAH ANTISIPATIF.....	74

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah atau SKPD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan visi misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam Program dan kegiatan Tahun 2017 adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana BPKAD
3. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur BPKAD
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan SKPD BPKAD
5. Meningkatkan kualitas penyusunan APBD dan APBD Perubahan secara tepat waktu dan berkualitas
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah
7. Meningkatkan kualitas pelayanan perbendaharaan kepada berbagai pihak terkait
8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan asset daerah

9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan evaluasi APBD dan Perubahan APBD serta Laporan Pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan didukung dengan dana DAU (Dana ALokasi Umum), PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan DBH (Dana Bagi Hasil) sebesar Rp.190.589.081.689,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.124.059.529.830,00 dan Belanja Langsung Rp.66.529.551.859,00.

Untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2017 diwujudkan melalui 8 (delapan) program dan 70 Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua Telah berhasil dalam melaksanakan beberapa sasaran dengan capaian realisasi anggaran mencapai 84,05%

P E N U T U P

A. Keberhasilan dan Kegagalan Kerja

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan dan Asset Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017 seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengembangan Sistem In

formasi dan Basis Data Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Papua, Penyusunan/Pembahasan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan. Dari kelima kegiatan yang tidak terlaksana dan Penyerapan atau Realisasi dari beberapa kegiatan yang relative rendah itulah yang mempengaruhi sehingga capaian hanya 84,05 %.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yaitu sebesar 84,21% menunjukkan adanya penurunan pelaksanaan program dan kegiatan dari segi anggaran yang disebabkan kurangnya kerjasama, koodinasi para pimpinan dan staf di lingkungan Badan Pengelolaan dan Asset Daerah Provinsi Papua.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan menjadi informasi yang wajib secara periodik dikomunikasikan kepada para *stakeholders* dan masyarakat yang selanjutnya dievaluasi oleh instansi yang melaksanakan fungsi evaluasi.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan dan Asset Daerah Provinsi Papua disajikan dengan harapan dapat memberikan informasi tentang akuntabilitas kinerja Badan kepada publik/*stakeholders* dalam rangka peningkatan kinerja Badan Pengelolaan dan Asset Daerah Provinsi Papua.

B. Langkah Antisipatif.

Sedangkan upaya antisipatif yang dilakukan antara lain :

1. Mengikutsertakan aparatur pengelola keuangan daerah dalam berbagai sosialisasi baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sendiri maupun Kementerian Dalam Negeri.
2. Meningkatkan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah khususnya penerapan sistem informasi keuangan daerah dan sistem informasi aset daerah.

Dilaksanakan rapat-rapat koordinasi untuk meningkatkan sinergitas antar bidang-bidang dilingkungan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua, juga peningkatan pelaksana SPIP. *ngka Pembangunan*

Jayapura, Februari 2017

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH PROVINSI PAPUA**

**Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN,SE.,MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641014 198603 1 016**